

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Surat al-Hadid ayat 7

Surat An-Nahl ayat 80

B. Buku

HarsonoBoedi. *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan, 2006

_____. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta : Universitas Trisakti, 2007

Santoso Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006

Soimin Soedharyo. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001

Roestamy Martin. *Konsep-konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi orang asingdihubungkan dengan Hukum Pertanahan*. Bandung : Alumni 2011

Oloan Sitorus & H.M. Zaki Sierrad. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2011

Soedikno Mertokusumo. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta : Karunia & Universitas Terbuka, 1998

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan. *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2007

- H. Muchsin. *Hukum Agraria Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2007
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Djuhaendah Hasan. *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2007
- Dr. Ir. Dewi Anggraeni Kolopaking Anita. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. Bandung : P.T. Alumni, 2013
- Perangin Effendi. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta : Cv. Rajawali, 1987
- Prof. Mr. Dr. Gautama Sudargo & Ellyda T. Soetijarto. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1997
- Prof. Mr. Dr. Gautama Sudargo & Ellyda T. Soetijarto. *Komentar Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : P.T. Citra Aditya Bakti, 1997
- A.P. Parlindungan. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria dan Tata Cara Pembuatan Akta Tanah*. Bandung : Alumni, 1990
- _____. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung : Mandar Maju, 1998
- _____. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria, cet. ke-2*. Bandung : Mandar Maju, 2001

- Adrian Sutedi. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2006
- Aslan Noor. *Konsep Hak Milik Atas tanah Bagi Bangsa Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, 2006
- Gunawan Widjaya. *Prinsip-prinsip Reforma Agraria (Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat)*. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama, 2001
- _____. *Transplantasi Trusts dalam KUH Perdata, KUHD dan Undang-undang Pasar Modal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- F. Sihombing. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, cet. ke-1*. Jakarta : Toko Gunung Agung Tbk, 2004
- H. Ali Achmad Chomzah. *Hukum Pertanahan, cet. ke-1*. Jakarta : Prestasi Pusaka, 2002
- H. Eddy Prajoto WS. *Antinomi Norma Hukum; Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional, cet. ke-1*. Bandung : Utomo, 2006
- Herman Hermit. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda (Teori dan Praktik Pendaftaran Tanah di Indonesia)*, cet. ke-1. Bandung : Bandar Maju, 2004
- Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Mahadi. *Falsafah Hukum; Suatu Pengantar*. Bandung : Alumni, 2007

Maria S.W. Sumardjono.*Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing.*Jakarta : Buku Kompas, 2007

Muchtar Wahid.*Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, cet. ke-1.*Jakarta : Republika, 2008

Muhammad Bakri.*Hak Menguasai Tanah oleh Negara, cet. ke-1.*Yogyakarta : Penerbit Citra Media, 2007

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor103 Tahun 2015tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2016 tentang pelaksanaan peraturan

pemerintah No. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 130-105/Sesmen/96 Tahun 1996 tentang penyampaian peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 1996 tentang perubahan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 1996 tentang persyaratan pemilikan rumah tinggal atau hunian oleh orang asing.

Surat Edaran Negara Perumahan Rakyat No. 124/UM 0101/M/12/97 tanggal 11 Desember 1997 tentang kelengkapan persyaratan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing.

D. Internet

<https://indonesianpropertylawwordpross.com/2009/03/11/kepemilikan-tempat-tinggal-oleh-orang-asing>

<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/Wily-Ardi-Yohanis-D1A009114.pdf>

<http://terberita.blogspot.com/2012/08/defenisi-rumah-menurut-para-ahli.html>

<http://www.pengertianpakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-analisis-data.html>

E. Lampiran

Surat Riset

Putusan 82/Pdt.G/2013/PN. Dps